



# Kapitalisme Ekstraktif sebagai Manifestasi Ideologi Antroposentris dalam Novel Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut Karya Dian Purnomo: Kajian Ekokritik

Mira Maslakhatul Latifah<sup>1\*</sup>, Suseno<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Program Studi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: [miralatifah@students.unnes.ac.id](mailto:miralatifah@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [susenows@mail.unnes.ac.id](mailto:susenows@mail.unnes.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [miralatifah@students.unnes.ac.id](mailto:miralatifah@students.unnes.ac.id)

**Abstract.** *The exploitation of natural resources in coastal areas and small islands in Indonesia shows the strong influence of the ideology of extractive capitalism. This ideology often causes ecological conflicts. For example, in the case of the rejection of gold mining that occurred on Sangihe Island, North Sulawesi. This article examines the contemporary Indonesian novel Perempuan yang Tunggu di Lorong Menuju Laut by Dian Purnomo in representing this problem. This study is a qualitative study with an interdisciplinary approach. The main theoretical framework used is ecocriticism (Glotfelty & Buell), extractive capitalism (Gudynas, Harvey, and Bebbington), and the concept of slow violence (Nixon) with a close reading method of the text. The results of the study show that the novel represents: the ideology of anthropocentric-extractive capitalism that reduces Sangihe Island to an economic commodity; dismantles the mechanism of power that conquers law and politics through the practice of elite and ruler collusion; displays the ecocentric resistance of the Sangihe community based on ancestral wisdom and spirituality. In conclusion, this novel voices an ideological critique of the hegemony of anthropocentrism and extractive capitalism and calls for a just and sustainable ecological awareness. Given the novel's limited data, further studies could consider exploring other research subjects or developing a theory of this research subject.*

**Keywords:** *Anthropocentrism; Ecocriticism; Extractive Capitalism; Indonesian Literature; Local Ecocentrism.*

**Abstrak.** Eksploitasi sumber daya alam di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh ideologi kapitalisme ekstraktif. Ideologi ini kerap menimbulkan konflik ekologis. Misalnya pada kasus penolakan tambang emas yang terjadi di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Artikel ini mengkaji novel kontemporer Indonesia Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut karya Dian Purnomo dalam merepresentasikan masalah tersebut. Studi ini merupakan kajian kualitatif dengan pendekatan interdisipliner. Kerangka teori utama yang digunakan adalah ekokritik (Glotfelty & Buell), kapitalisme ekstraktif (Gudynas, Harvey, dan Bebbington), dan konsep *slow violence* (Nixon) dengan metode close reading teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel merepresentasikan: ideologi antroposentris-kapitalisme ekstraktif yang mereduksi Pulau Sangihe menjadi komoditas ekonomi; membongkar mekanisme kekuasaan yang menaklukkan hukum dan politik melalui praktik kolusi elit dan penguasa; menampilkan resistensi ekosentris masyarakat Sangihe yang berlandaskan kearifan leluhur dan spiritualitas. Simpulannya, novel ini menyuarakan kritik ideologis terhadap hegemoni antroposentrisme-kapitalisme ekstraktif dan menyerukan kesadaran ekologis yang berkeadilan dan berkelanjutan. Mengingat adanya keterbatasan data novel, studi lanjutan dapat mempertimbangkan eksplorasi objek kajian lain atau mengembangkan teori objek kajian ini.

**Kata kunci:** Antroposentrisme; Ekokritik; Ekosentrisme Lokal; Kapitalisme Ekstraktif; Sastra Indonesia.

## 1. LATAR BELAKANG

Eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari praktik kapitalisme ekstraktif (Savitri, 2022). Praktik ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh logika kapitalisme rasial (Dulhunty, 2023; Gill, 2021). Pengadaan proyek pembangunan berskala besar seperti penambangan logam mulia sering dibingkai sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan (Pradhan & Kumar, 2023). Namun,

dalam praktiknya, hal ini seringkali berujung pada akumulasi keuntungan modal melalui perampasan aset dan sumber daya (Harvey, 2003).

Salah satu proyek pertambangan besar yang dilakukan di pulau kecil Indonesia adalah di Pulau Sangihe, Sulawesi Utara. Masyarakat Sangihe menolak keberadaan PT Tambang Mas Sangihe yang mengantongi izin untuk mengeksploitasi lebih dari separuh wilayah pulau (Wahyudin et al., 2024). Penolakan ini didasari kekhawatiran akan ancaman terhadap ketersediaan sumber air bersih dan keberlanjutan ruang hidup mereka (Bisht, 2019; Irfan et al., 2024; Juanda, 2025).

Fenomena serupa juga terjadi pada aktivitas penambangan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat Lampung. Aktivitas penambangan tersebut mengakibatkan pencemaran sungai karena kandungan merkuri yang mengancam kesehatan serta ekosistem di sekitarnya (Yuwono et al., 2023). Persoalan ini semakin diperparah dengan kebijakan perizinan pertambangan yang dianggap melanggar prinsip perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Papendang et al., 2023).

Masalah kekerasan lambat yang timbul dari fenomena tersebut bisa saja akan menjadi masalah baru, khususnya di Kepulauan Sangihe (Nixon, 2011). Tidak hanya berdampak pada lingkungan, namun juga masyarakat setempat. Isu lingkungan dan sosial dalam realitas seperti ini sering diadopsi oleh pengarang dalam sebuah karya sastra (Harahap & Br Karo Sekali, 2025). Sehingga, beberapa karya sastra terkadang memiliki alur cerita yang relevan dengan realitas yang sedang terjadi. Salah satu pengarang yang mengadopsi hal tersebut adalah Dian Purnomo.

Dian Purnomo merupakan seorang penulis dan peneliti. Berangkat dari pengalamannya yang bergelut di penelitian sosial, seperti isu perempuan, anak, dan lingkungan, ia melahirkan karya-karya yang berwarna. Melalui karyanya yang berbasis pada pengalaman di sekitar tersebut, ia berharap dapat memperbaiki ketimpangan sosial di kehidupan nyata. Seperti yang tercermin dalam novelnya, *Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut* (Purnomo, 2023).

Novel tersebut mengisahkan perjuangan tokoh perempuan Shalom Mawira dan masyarakat Kepulauan Sangihe dalam menolak kedatangan tambang emas yang mengancam laut dan tanah kelahiran mereka. Perusahaan tambang emas yang mencoba untuk mengeksploitasi terlibat perlawanan oleh masyarakat setempat. Dalam prosesnya, perusahaan berupaya untuk menutupi citra eksploitasi dengan dalih kesejahteraan dan pembangunan. Berbagai tokoh sosial terlibat dalam proses eksploitasi ini, terutama yang terkait dengan perizinan. Di sisi lain, tokoh masyarakat Sangihe yang berangkat dari Shalom Mawira menolak

keras praktik eksploitasi di daerah mereka. Tokoh Shalom dan masyarakat Sangihe berupaya untuk mempertahankan tanah Sangihe dan menjaga laut mereka dari perusahaan asing yang mencoba untuk mengeksploitasi.

Novel ini berfungsi sebagai representasi naratif atas isu-isu yang terjadi di Kepulauan Sangihe. Sebab, isu yang diangkat berupa praktik-praktik ekstraktif dan dampaknya terhadap ekologi dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Sehingga, novel *Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut* karya Dian Purnomo berperan krusial sebagai media ekokritik untuk menganalisis dan mengartikulasikan ketimpangan sosial dan kerusakan ekologis yang terjadi (Buell, 1995; Glotfelty & Fromm, 1996). Sehingga, dibutuhkan kajian sastra lingkungan sebagai pisau analisis untuk membongkar isu-isu lingkungan tersebut dan teori kapitalisme ekstraktif untuk menguraikan praktik kapitalisme dalam melakukan ekstraktivisme tersebut (Harsono, 2008).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Sejauh ini, kajian terhadap novel *Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut* (2023) telah memberikan kontribusi penting dalam mengungkap dampak ekstraktivisme dari berbagai perspektif. Analisis penelitian-penelitian terdahulu cenderung berkonsentrasi pada aspek sosial (sosiologi sastra) dan gender (feminisme), ekofeminisme (Juanda, 2025; Nikmah et al., 2024; Safitri et al., 2024; Salsabila, 2024; Wahyudin et al., 2024). Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian berupa akar ideologi struktural yang mendasarinya.

Keterbatasan penelitian terkait isu ini meluas dalam studi ekokritik sastra di Indonesia. Misalnya, penelitian Rini (2018); Supian et al. (2022) yang hanya menyoroti manifestasi kerusakan ekologis. Penelitian-penelitian tersebut belum bergerak ke arah kritik terhadap sistem kapitalis ekstraktif yang mempeloporinya. Akan tetapi, dalam bidang kajian ilmu sosial di Indonesia hal tersebut sudah ada. Nugraha & Purwanto (2020) menganalisis praktik struktural neo-ekstraktivisme dan Berenschot & Dhiaulhaq (2023) menganalisis perampasan tanah.

Sementara itu, di tingkat global, ekokritik telah bergerak maju dalam menghubungkan karya sastra dengan analisis ekstraksi ketidakadilan lingkungan dan dalam studi lapangan kapitalisme rasial (Dulhunty, 2023; Gill, 2021; Karmakar & Chetty, 2023). Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini diperlukan untuk mengungkap dimensi ekologi struktural novel yang berfokus pada manifestasi ideologi kapitalisme ekstraktif sebagai sumber utama kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan kombinasi kerangka kerja ekokritik (Buell, Glotfelty) dengan teori kapitalisme ekstraktif (Gudynas, Harvey, Bebbington) dan

konsep Kekerasan Lambat (Nixon), yang sebelumnya belum terintegrasi secara komprehensif dalam studi novel Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut.

Sebagaimana ditunjukkan Glotfelty & Fromm (1996), sebagian besar teori sastra cenderung mengabaikan dimensi lingkungan. Padahal, isu ekologi memainkan peran krusial dalam membentuk representasi budaya. Konsep ini berangkat dari premis bahwa lingkungan fisik bukan sekadar latar pasif, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk karya sastra dan persepsi manusia tentang alam (Glotfelty & Fromm, 1996). Dengan demikian, ekokritik berusaha mengungkap hubungan yang timpang antara manusia dan alam serta bentuk-bentuk dominasi manusia atas lingkungan yang termanifestasi dalam karya sastra.

Sejalan dengan itu, menurut Buell (1995), karya sastra yang berpihak pada lingkungan mampu mengungkap ideologi destruktif yang menyertai eksploitasi alam. Lingkungan dalam hal ini hadir sebagai aktor yang turut terdampak dan terlibat dalam konflik sosial. Menurutnya, terdapat empat kriteria teks ekokritis, yaitu: (1) alam menjadi pusat representasi teks; (2) kepedulian manusia terhadap lingkungan dipandang sebagai tanggung jawab etis; (3) kesadaran moral manusia mencakup tanggungjawabnya terhadap lingkungan; (4) alam dalam teks sastra digambarkan sebagai entitas dinamis yang turut membentuk konflik dan nilai-nilai dalam teks. Pandangan ini membentuk persepsi bahwa sastra ekologis berfungsi sebagai ruang etis yang mencerminkan interaksi saling memengaruhi antara manusia dan alam.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami benturan antara antroposentrisme dan ekosentrisme sebagai akar konflik ekologis dalam teks sastra (Heise, 2017). Glotfelty & Fromm (1996) menjelaskan bahwa teori sastra tradisional bersifat antroposentris karena memusatkan manusia sebagai pusat makna. Sebaliknya, ekokritik berupaya memperluas cakrawala interpretasi hingga mencakup seluruh ekosfer sebagai bagian dari sistem makna. Dengan demikian, benturan antara antroposentrisme dan ekosentrisme dapat dibaca sebagai benturan antara pandangan dunia kapitalistik ekstraktif yang menempatkan alam sebagai objek ekonomi dan pandangan ekologis masyarakat lokal yang memandang alam sebagai entitas hidup yang bernilai intrinsik.

Kerangka ini menempatkan ekokritik selain menelaah representasi alam dalam karya sastra, juga mengkritisi relasi kuasa dan ideologi yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Glotfelty & Fromm (1996) menegaskan bahwa teks sastra tidak sekadar mencerminkan realitas, tetapi juga dapat menjadi medium perlawanan terhadap ideologi yang merusak lingkungan. Ideologi tersebut termasuk logika kapitalistik yang menjadikan alam sebagai komoditas ekonomi. Dengan demikian, sastra berfungsi sebagai ruang diskursif yang

merekam, mengungkap, sekaligus mengkritik ketimpangan ekologis serta dominasi negara dan korporasi dalam narasi pembangunan.

Salah satu bentuk relasi kuasa yang dikaji dalam konteks ini yaitu kapitalisme ekstraktif. Istilah “ekstraktivisme” berkembang di Amerika Latin sejak awal abad ke-20 dan mulai dipopulerkan pada 1950-an oleh para ekonom untuk menggambarkan praktik industri pertambangan dan perminyakan (Gudynas, 2015). Gagasan ini merujuk pada pengambilan sumber daya alam dalam skala besar untuk mendukung kepentingan industrialisasi yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan ekologis secara signifikan (Gudynas, 2018).

Praktik ekstraktivisme berkembang dalam empat generasi: (1) generasi pertama, mengandalkan teknologi tradisional yakni tenaga manusia dan hewan; (2) generasi kedua, muncul pada masa revolusi industri dengan penggunaan mesin uap, pupuk kimia, dan bahan peledak; (3) generasi ketiga, ditandai oleh ekspansi tambang terbuka, monokultur, serta eksploitasi minyak dan gas yang memerlukan alat berat dan sumber energi maupun air dalam jumlah besar; (4) generasi keempat, ditandai dengan praktik invasi seperti fracking dan eksplotasi pasir bitumen yang berteknologi tinggi, tetapi menimbulkan konsekuensi sosial-ekologis serius yang mengancam keberlanjutan peradaban (Gudynas, 2015).

Lebih jauh, ekstraktivisme dipahami juga sebagai perwujudan logika kapitalisme global yang bekerja melalui dominasi ekonomi dan politik serta ketimpangan distribusi sumber daya (Savitri, 2022). Sistem ini memandang alam tidak lagi dipandangruang sebagai ruang hidup, melainkan sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi semata. Seperti dalam konsep “*accumulation by despossession*” Harvey (2003) yang menyebutkan bahwa kapitalisme mempertahankan akumulasi melalui perampasan sumber daya, privatisasi ruang publik dan komodifikasi alam. Dengan kata lain, praktik ekstraktivisme menjadi mekanisme utama dalam memperluas kontrol terhadap ruang dan sumber daya yang dapat melanggengkan ketimpangan struktural.

Namun, di sisi lain, ketika dalam suatu negara atau wilayah memiliki sumber daya alam yang melimpah justru dapat berpotensi menciptakan paradoks pembangunan. Ketika pengelolaan alam didominasi oleh kepentingan negara dan korporasi, wilayah tersebut sering kali menimbulkan ketimpangan ekonomi, korupsi serta degradasi lingkungan (Alssadek & Benhin, 2023). Fenomena ini dikenal sebagai “*resource curse*”. Paradoks tersebut menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak selalu identik dengan kesejahteraan. Kondisi ini terjadi karena kekuasaan politik dan ekonomi lebih berpihak pada akumulasi keuntungan daripada kelestarian lingkungan dan keadilan sosial untuk masyarakat sekitar (Rahmadi et al., 2024).

Bebbington et al. (2008) mencatat bahwa proyek ekstraktif sering kali menimbulkan kontroversi pembangunan akibat lemahnya regulasi dan rendahnya partisipasi masyarakat lokal. Dominasi kapitalisme melalui keterlibatan negara dalam mendukung proyek ekstraksi pertambangan berupa perizinan dalam memfasilitasi investor asing yang seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat setempat (Hartoto, 2025). Situasi ini memperlihatkan lemahnya posisi sosial dan politik komunitas lokal dan menciptakan kerusakan ekologis. Akibatnya, muncul berbagai resistensi masyarakat dalam menuntut keadilan ekologis dan hak atas ruang hidupnya.

Berdasarkan kerangka di atas, praktik kapitalisme ekstraktif memicu kerusakan ekologis sebagai konsekuensi struktural yang melekat dalam sistem tersebut. Sejalan dengan pernyataan ini, Nixon (2011) melalui konsep "*slow violence*" menyatakan bahwa kekerasan ekologis berlangsung secara perlahan dan tersebar. Penderitaan yang dialami manusia dan lingkungan muncul secara bertahap akibat proses eksploitatif yang tidak terlihat oleh kasat mata. Studi *slow violence* dalam kajian sastra menyoroti karya fiksi secara efektif memproyeksikan ketidakadilan lingkungan yang dialami komunitas marjinal sebagai akibat dari praktik ekstraksi (Karmakar & Chetty, 2023). Dengan demikian, kekerasan ekologis tidak selalu hadir secara fisik dan langsung, melainkan dapat bekerja melalui sistem ideologis yang dilegitimasi oleh negara dan korporasi (Henry, 2019). Gagasan Nixon ini memperkuat relevansi teori ekstraktif dan ekokritik dalam membaca novel ini.

Berdasarkan keterkaitan uraian di atas, studi ini berupaya untuk mengungkap benturan relasi antara ideologi antroposentris dan ekosentris. Ideologi tersebut termanifestasi dalam novel oleh kelompok pro kapitalisme ekstraktif yakni pemilik modal dan pemegang kekuasaan dan kelompok kontra yakni masyarakat Sangihe. Masalah ini diuraikan dengan rincian pertanyaan: (1) apa saja manifestasi ideologi antroposentris-kapitalisme ekstraktif yang terdapat dalam novel?. (2) bagaimana novel menggambarkan mekanisme kekuasaan antroposentris-kapitalisme ekstraktif?. (3) bagaimana bentuk resistensi ekosentris masyarakat Sangihe yang ditampilkan dalam narasi novel Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut karya Dian Purnomo?.

### **3. METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan perspektif kualitatif berupa analisis teks sastra yang bersifat interpretatif (Endraswara, 2016). Metode kualitatif dipilih untuk menelaah secara mendalam dan menafsirkan representasi ideologis dalam novel. Pendekatan yang digunakan adalah interdisipliner Ratna (2011) dengan memadukan tiga kerangka teori utama yaitu ekokritik

(Glotfelty & Buell) sebagai lensa untuk mengungkap relasi manusia dan alam, kapitalisme ekstraktif (Gudynas, Harvey, dan Bebbington dkk.) untuk membedah ideologi pembangunan dan jaringan kekuasaan, serta konsep *slow violence* (Nixon) untuk menyoroti dampak ekologis.

Data penelitian ini berupa kutipan teks, dialog, simbol, dan narasi dalam novel *Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut* sebagai data primer (Purnomo, 2023). Data sekunder berupa literatur pendukung seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan ketiga teori. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan prosedur *close reading* yang mencakup pencatatan dan pengklasifikasian bagian-bagian teks yang merepresentasikan konflik ideologis dan ekologis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif interpretatif. Data kutipan teks diuraikan dan ditafsirkan menggunakan ketiga teori di atas untuk memahami relasi manusia dan alam, jaringan kekuasaan, dan dampak sistemik. Hasil analisis kemudian disusun untuk menunjukkan bahwa novel merepresentasikan kritik terhadap ideologi kapitalisme ekstraktif sekaligus menampilkan konflik sosial dan ekologis tokoh masyarakat Sangihe.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pembacaan ekokritik terhadap novel *Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut* karya Dian Purnomo menunjukkan representasi komprehensif mengenai kapitalisme ekstraktif yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan. Sistem ini menimbulkan disfungsi tatanan, sosial, hukum dan etika terhadap masyarakat Sangihe. Sedangkan alam Sangihe hanya dijadikan sebagai objek eksploitasi tanpa memerhatikan keseimbangannya. Temuan ini diklasifikasikan ke dalam tiga fokus utama yang merepresentasikan kritik ideologis dan ekologis dalam novel, yaitu (1) manifestasi ideologi antroposentris-kapitalisme ekstraktif, (2) mekanisme kekuasaan antroposentrisme-kapitalisme ekstraktif, dan (3) resistensi ekosentrisme.

##### **Manifestasi Ideologi Antroposentris-Kapitalisme Ekstraktif**

Kritik terhadap kapitalisme ekstraktif dalam novel *Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut* dimulai dari tujuan kedatangan perusahaan tambang emas Sangihe. Sejak awal, pengarang memperlihatkan ideologi antroposentris bekerja dengan mereduksi Pulau Sangihe dari ruang hidup ekologis menjadi sekadar komoditas finansial. Dalam pandangan Gudynas (2015), hal ini merupakan bentuk nyata dari logika ekstraktivisme yang berorientasi pada ekonomi dengan menempatkan alam hanya sebagai sumber nilai tukar, bukan nilai intrinsik alam. Perspektif ini sejalan dengan gagasan Glotfelty & Fromm (1996) bahwa teks sastra dapat menjadi arena untuk menyingkap ideologi yang menormalisasi eksploitasi

lingkungan. “Tepat sebulan aku menginjakkan kaki di pelabuhan Tahuna, sebuah perusahaan penambang emas masuk ke pulau ini untuk merampok kekayaan alamnya.” (hlm. 28).

Kutipan ini menandai awal munculnya mekanisme ekstraktif di Sangihe. Diksi “merampok kekayaan alamnya” memperlihatkan sikap agresif manusia terhadap alam yang ingin mengeksploitasi. Dalam perspektif Buell (1995), representasi semacam ini menunjukkan bahwa lingkungan adalah subjek penderita akibat ideologi manusia yang berpandangan antroposentris. Perusahaan tambang emas tersebut berperan sebagai agen kapitalistik yang memandang alam hanya dari sisi fungsional dan ekonomis. Pandangan antroposentrisme dan kapitalisme ekstraktif ini tertuju sebagai upaya untuk menindas ekologi dan masyarakat Sangihe.

Kutipan selanjutnya memperkuat ironi ideologis yang menyertai praktik eksploitasi tersebut. Perusahaan tidak datang dengan memperlihatkan kekerasan terhadap alam secara langsung. Namun, mereka membungkus tujuannya dalam retorika kesejahteraan dan narasi kemajuan pembangunan. Di sisi lain, kebijakan perusahaan dalam menawarkan harga beli tanah warga sangat rendah. “Sekarang, dengan topeng menyejahterakan kehidupan warga di Sangihe, atas nama investasi untuk meningkatkan indeks pembangunan negara, dan entah dusta apa lagi yang mereka ciptakan, perusahaan asing ini mau membeli tanah warga seharga sepuluh ribu rupiah per meter persegi.” (hlm. 42).

Kutipan ini menggambarkan peran kapitalisme ekstraktif dalam mengekstraksi sumber daya, yang diawali dengan invasi ekonomi dan legitimasi melalui narasi pembangunan (Berenschot & Dhiaulhaq, 2023; Hartoto, 2025). Praktik eksploitasi tersebut ditunjukkan melalui mekanisme jual beli tanah. Harga beli tanah yang ditawarkan oleh perusahaan sangat rendah, yaitu sebesar sepuluh ribu per meter persegi. Kondisi ini secara efektif menghapus nilai ekologis dan kultural atas entitas alam dan manusia didalamnya. Artinya, perusahaan hanya melihat tanah Sangihe hanya sekadar dijadikan sebagai aset properti yang harganya ditentukan oleh kekuatan pasar. Reduksi tanah melalui pembelian tanah warga dalam jumlah yang tidak wajar ini dapat dikatakan sebagai upaya perampasan tanah oleh tokoh elit dan kuasa (Berenschot & Dhiaulhaq, 2023).

Frasa “topeng kesejahteraan” adalah bentuk hegemoni wacana yang dipakai untuk menutupi motif utama akumulasi modal melalui perampasan aset tanah (Harvey, 2003). Dalam kerangka ekokritik, tindakan ini menghapus relasi emosional dan spiritual masyarakat Sangihe dengan alamnya dan menggantinya dengan logika ekonomi. Tanah Sangihe yang sebelumnya dianggap sebagai identitas, mata pencaharian, dan ekosistem lokal, justru diartikan sebagai properti tidak bernilai yang mudah dibeli oleh perusahaan. Fenomena ini mencerminkan bentuk

nyata dehumanisasi dan deekologisasi yang dihasilkan ideologi antroposentris (Karmakar & Chetty, 2023).

Ideologi kapitalisme ekstraktif dalam novel tidak hanya beroperasi melalui kekuasaan korporasi. Ideologi ini juga menyusup ke kesadaran masyarakat Sangihe melalui *transfer* pengetahuan destruktif. Narasi ini merupakan gambaran yang terjadi di pulau Selebas yang terletak di sisi selatan Pulau Sangihe. Pengarang menarasikan praktik pertambangan besar di luar Pulau Sangihe menjadi titik penyebaran ekstraktif di kalangan masyarakat Sangihe. “Di masa itu, Selebas sendiri sedang memiliki banyak proyek tambang. Banyak orang Sangir bekerja di tambang-tambang besar tersebut. Dengan modal otot didikan berkebun dan melaut, mereka belajar bagaimana memilah tanah yang sudah digali untuk kemudian menjadi serbuk emas. Di sanalah mereka belajar dan mendengar bahwa di halaman belakang rumah mereka di Sangihe juga kaya emas. Setelah selesai bekerja di perusahaan-perusahaan tambang besar, mereka pulang ke Sangihe dengan ilmu mendapatkan emas di lahan sendiri. Bermodalkan cangkul, martil, tатаh, dan peralatan seadanya, mereka mulai menggali emas di lahan sendiri.” (hlm. 40).

Kutipan ini menggambarkan masyarakat Sangihe yang pernah bekerja di kawasan pertambangan Selebas mulai meniru praktik pertambangan secara mandiri. Pengetahuan yang diperoleh dari sistem industri ekstraktif kemudian diterapkan di tanah mereka sendiri dengan peralatan sederhana. Masyarakat di sini berperan menjadi agen dari sistem yang sebelumnya menindas mereka. Dari yang semula bergantung pada tanah dan laut sebagai sumber hidup, kemudian beralih dengan memandang sumber daya alam di sekitar tempat tinggal mereka sebagai sumber daya ekonomi. Masyarakat yang semula menjadi korban justru mewarisi dan melanjutkan sistem yang merusak. Kondisi ini memperlihatkan unsur kekerasan ekologis sekaligus hegemoni antroposentris yang termanifestasi melalui kesadaran sosial masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya, narasi beralih mengkritik hasil akhir dari ideologi kapitalisme ekstraktif. Janji kesejahteraan yang ditawarkan oleh perusahaan sebelumnya adalah sebuah dusta yang terstruktur. Narasi ini sekaligus menjembatani kritik ekonomi ke kritik sosial mengenai ketimpangan struktural. “Emas yang didapat hanya akan dinikmati oleh segelintir orang, bahkan belum tentu semua pekerja tambang bisa ikut menikmati kemakmuran yang sama. Mereka yang bekerja paling berat, biasanya yang paling sedikit menikmati keuntungan. Tapi yang duduk di puncak pimpinan, para pemilik modal, para penguasa yang melindungi kejahatan di balik terlaksananya penambangan, mereka yang akan bergelimang harta.

Sementara masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, yang tanahnya direnggut untuk dilubangi, merekalah yang akan paling sengsara hidupnya.” (hlm. 38).

Kutipan ini merepresentasikan bentuk ketimpangan struktural sebagai dampak dari ideologi kapitalisme ekstraktif. Sistem ini membuat keuntungan hanya berputar di puncak para pemilik modal dan elit penguasa. Sementara, masyarakat sekitar yang kehilangan tanahnya menanggung kerusakan lingkungan terbesar. Ketidakadilan ini menunjukkan bahwa antroposentrisme kapitalistik tidak hanya merusak alam, tetapi juga memperlebar jurang sosial (Savitri, 2022). Ekokritik memandang ini sebagai ketidakadilan ekonomi sekaligus „kekerasan ekologis“. Masyarakat sekitar menjadi korban paling rentan dan yang diuntungkan adalah mereka yang berada di puncak hirarki modal dan kekuasaan.

Dalam sub temuan ini, novel menunjukkan ideologi antroposentris-kapitalisme ekstraktif menjadi akar kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial yang terjadi di Pulau Sangihe. Kedatangan perusahaan tambang emas menandai beroperasinya logika ekstraktivisme yang berusaha mereduksi tanah Sangihe menjadi komoditas ekonomi. Mereka berupaya menghapus entitas nilai ekologis dan kultural masyarakat Sangihe melalui praktik perampasan tanah yang dibungkus melalui retorika pembangunan dan kesejahteraan. Tindakan korporasi mencerminkan bentuk dehumanisasi dan de-ekologisasi bahwa alam dan manusia direduksi menjadi instrumen produksi. Lebih jauh, ideologi ini bahkan telah menyusup ke kesadaran sosial masyarakat melalui *transfer* pengetahuan destruktif dari sistem industri tambang yang direplikasi. Masyarakat Sangihe menjadi korban dan tanpa sadar juga menjadi agen dari sistem yang menindas mereka sendiri. Kondisi ini menunjukkan kapitalisme ekstraktif tidak hanya merusak alam, tetapi juga memperlebar jurang sosial (*hegemoni*) antara elit modal dan masyarakat lokal. Fenomena ini sejalan dengan konsep *resource curse*, ketika kekayaan alam justru melahirkan kemiskinan dan ketimpangan akibat dominasi ideologi antroposentris yang menormalisasi eksploitasi (Rahmadi et al., 2024). Dengan demikian, novel menghadirkan kritik terhadap hegemoni antroposentrisme dan menyuarakan kesadaran ekologis yang lebih adil dan etis.

### **Mekanisme Kekuasaan Antroposentrisme-Kapitalisme Ekstraktif**

Novel beralih mengkritik kekuasaan antroposentrisme-kapitalisme ekstraktif yang mampu menaklukan sistem politik dan hukum. Ideologi ini beroperasi melalui mekanisme legal, politik, dan sosial yang menempatkan kepentingan modal di atas kelestarian ekologis. Kekuasaan antroposentris tampak melalui dominasi negara dan korporasi yang menjadikan alam sebagai objek ekonomi.

Pengarang menampilkan sistem kapitalisme ekstraktif merasuki kehidupan warga Sangihe dengan membalikkan nilai-nilai ekologis menjadi nilai tukar. Kritik dimulai dengan menunjukkan bahwa negara gagal menegakkan aturannya sendiri sebagai dasar bagi legalitas ekstraksi. Pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan pulau kecil menjadi bukti ideologi negara telah terkooptasi oleh modal.

“Pulau Sangihe memiliki luas 73 ribu hektar.” (hlm. 34). “Beberapa tahun lalu ada sebuah peraturan yang dibuat oleh negara ini untuk melindungi pulau-pulau kecil dan pesisir Nusantara agar terjaga keindahan dan kelestariannya. Di dalam aturan itu disebutkan bahwa pulau-pulau berukuran di bawah 200 ribu hektar tidak boleh ditambang.” (hlm. 34). Kutipan ini menunjukkan bentuk awal dari kuasa antroposentris mulai mengakar dalam struktural. Regulasi yang seharusnya menjadi pelindung alam justru dilemahkan demi kepentingan ekonomi. Dalam perspektif Glotfelty, tindakan ini memperlihatkan alam direduksi menjadi entitas pasif yang tunduk pada kepentingan manusia. Pelanggaran hukum ini merupakan bentuk kekerasan ekologis yang dilegitimasi oleh kekuasaan manusia atas alam (*extractivist logic*-Gudynas). Sekaligus, merupakan bentuk pelanggaran dalam prinsip perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (Papendang et al., 2023).

Kekuasaan ini tidak hanya berada di level kebijakan, melainkan juga berada di kepentingan politik yang lebih luas. “Ketika akhirnya perusahaan mendapatkan izin lingkungan dan izin operasional di tanah yang katanya dilindungi negara dan tidak boleh ditambang, satu kepercayaan sudah hilang. Seharusnya izin itu tidak pernah keluar jika negara benar-benar menaati aturan yang mereka buat sendiri.” (hlm. 252). Kutipan ini menarasikan ideologi antroposentris dilembagakan dalam struktur kekuasaan negara. Pemerintah yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung warga dan lingkungan, justru menjadi agen kapital. Relasi ini menggambarkan dimensi politik dari krisis ekologis (Buell). Kekuasaan antroposentris ini tidak lagi sekadar pandangan individual melainkan menjadi sistemik dan transnasional. Analisis ini menegaskan bahwa izin pertambangan yang keluar adalah kekerasan politik terhadap hukum itu sendiri. Negara cenderung mengorbankan hak masyarakat lokal demi investasi yang menimbulkan konflik seius di lapangan (Bebbington et al., 2008).

Kegagalan negara di tingkat regulasi diperburuk dengan kolusi di tingkat kepemimpinan daerah. Hal ini menunjukkan kekuasaan antroposentris ekstraktif semakin kompleks merusak struktur sosial-politik dari atas ke bawah melalui narasi pembangunan. “Warga tentu saja terkejut... Kali ini kapitaluan justru duduk di belakang meja pertemuan tersebut bersama dengan para tamu asing... Mereka berada di pihak perusahaan, berusaha meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan bertujuan baik dan sebaiknya masyarakat menjual tanah demi

kesejahteraan bersama.” (hlm. 32). Kutipan ini menunjukkan tokoh Kapitaluan (pemimpin tradisional) sebagai agen kooptasi elit dalam kerangka ekstraktivisme. Tindakan tokoh Kapitaluan ini membuktikan ideologi antroposentris ekstraktif mampu merusak hirarki sosial dengan menukar loyalitas komunitas atas kepentingan pribadi. Hal ini mengubah konflik ideologis menjadi konflik internal dan memfasilitasi perampasan. Sekaligus, ideologi ekonomi yang merusak lingkungan tampak dari upaya menyamarkan eksploitasi dengan retorika kesejahteraan.

Praktik kekuasaan ini tidak hanya bekerja melalui wacana, namun juga melalui kontrol sosial yang menundukkan masyarakat lokal. “Hari itu kami semua beruntung karena kapitaluan Bowone sedang tidak ada di tempat... Dia bahkan sudah menjual sebagian tanahnya pada perusahaan, dan menjadi satu dari sedikit orang yang pembayaran tanahnya langsung dilunasi. Jika ditotal, tak sampai sepuluh orang mendapat perlakuan seperti ini. Begitulah bagaimana perusahaan berupaya memanipulasi rakyat. Yang dilunasi di awal adalah orang-orang yang memiliki peran penting di masyarakat, supaya mereka kemudian bisa membujuk yang lain agar mau ikut menjual tanah.” (hlm. 61). Kutipan ini menggambarkan bujukan hegemoni antroposentris. Kesadaran warga diubah melalui bujukan ekonomi dan janji jabatan. Dalam perspektif ekokritik, tindakan ini menunjukkan bahwa kapitalisme tidak hanya merusak alam secara fisik tetapi juga memanipulasi kesadaran ekologis masyarakat. Alam tidak lagi di pandang sebagai ruang hidup yang sakral, melainkan aset ekonomi yang bisa dinegosiasikan.

Selain itu, novel menarasikan praktik korupsi melalui mekanisme sistemik yang diperlukan untuk mengubah praktik ilegal menjadi legal secara formal. Misalnya dalam proses perizinan tambang yang dilakukan melalui proses politik yang korup. “Seperti halnya praktik pertambangan di tempat lain di muka bumi ini, perizinan mereka memang legal karena sudah mendapatkan semua stempel yang dibutuhkan. Tetapi jalur yang ditempuh sampai semua stempel dan tanda tangan itu terbubuh di atas selebar kertas berjudul izin tersebut, bisa jadi ditempuh dengan cara-cara tidak legal. Memalsukan atau menyalahgunakan tanda tangan, menyuap, melakukan bujuk rayu dan intimidasi, menipu, memanfaatkan kepolosan dan ketidakpahaman masyarakat. Cara-cara tersebut sering kali ditempuh untuk mendapatkan izin. Apakah ini yang disebut legal?” (hlm. 174).

Kutipan ini menandai inti kritik korupsi lingkungan. Narasi tersebut menyingkap lapisan lain dari kekuasaan antroposentris berupa kekerasan struktural yang disamarkan oleh stempel dan tanda tangan (*slow violence*). Penyalahgunaan instrumen hukum, suap, dan pemalsuan, dianalisis sebagai biaya operasional politik yang dibayarkan untuk melegitimasi ideologi antroposentris. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek berjalan, meskipun bertentangan

dengan etika dan hukum perlindungan lingkungan. Kekerasan lambat ini, jauh lebih berbahaya daripada kontak fisik tidak langsung. Secara perlahan, kekerasan ini menggerogoti jaminan hukum masyarakat dan menciptakan kerentanan ekologis jangka panjang yang dilegitimasi oleh negara.

Kekuatan modal menjadi sumber kuasa yang melahirkan praktik korupsi dan kian mengakar. Kondisi ini terjadi karena para elit birokrasi memperoleh legitimasi yang secara terstruktur melindungi impunitas secara terselubung. “Para pihak yang terdiri atas pemimpin perusahaan, pengacara, pihak yang pro terhadap mereka, para aparat yang mendukung, pemerintah pusat yang mengeluarkan izin produksi, pemerintah provinsi yang memberikan izin lingkungan, kita semua mengenal peran-peran mereka. Namun, kita juga samasama tahu, sulit untuk membawa mereka ke meja hijau. Uang dan kekuasaan yang ada di sekitar mereka seperti selaput pelindung tak kasatmata yang selalu mengamankan posisi orang-orang itu. Sementara masyarakat kecil tidak memiliki apa pun untuk melindungi diri. Benar pun bisa jadi salah.” (hlm. 131).

Dari lensa ekonomi-politik, kutipan ini menegaskan bahwa “uang dan kekuasaan” diartikan sebagai perisai kekebalan hukum bagi para pemegang ideologi kapitalisme ekstraktif. Frasa “mengamankan posisi” menunjukkan bahwa hukum telah dikuasai oleh kepentingan modal. Sistem hukum yang melayani modal dan mengorbankan masyarakat adat ini sebagai bagian dari kapitalisme rasial dan ekologi politiknya (Dulhunty, 2023; Gill, 2021). Dalam sistem ini, pelaku eksploitasi tidak hanya kebal hukum, tetapi juga mampu membelokkan kebenaran. Ideologi kapitalisme ekstraktif tidak hanya menjarah sumber daya alam, tetapi juga menguasai struktur hukum dan politik. Akibatnya, perjuangan masyarakat kecil menjadi tidak seimbang karena kebenaran tidak lagi berpihak kepada mereka.

Taktik politik memecah belah solidaritas masyarakat Sangahe turut ditampilkan dalam novel ini. Strategi perusahaan yang semula menciptakan konflik vertikal antara warga dan perusahaan, kemudian dialihkan menjadi konflik horizontal antar sesama warga. “Ada desas-desus kalau orang-orang yang pro tambang itu mendapat bayaran untuk melawan warga yang marah. Uang 50-100 ribu rupiah per hari bisa mengubah saudara jadi musuh. Kawan jadi lawan.” (hlm. 90). Kutipan ini merepresentasikan bentuk ketimpangan struktural sebagai dampak lanjutan dari ideologi kapitalisme ekstraktif. Sistem ini membuat keuntungan hanya berputar di kalangan pemilik modal dan elit. Sementara, masyarakat sekitar justru yang kehilangan tanah dan menanggung kerusakan lingkungan. Ketidakadilan ini memperlihatkan bahwa antroposentrisme kapitalistik tidak hanya merusak alam, namun juga memperlebar

jurang sosial. Dalam pandangan ekokritik, situasi ini merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi sekaligus kekerasan ekologis (*slow violence*).

Sub temuan ini menegaskan bahwa kekuasaan antroposentrisme-kapitalisme ekstraktif menaklukan sistem politik, hukum, dan sosial. Ideologi ini bekerja secara sistemik melalui kolaborasi negara, korporasi, dan elit lokal yang menempatkan kepentingan modal di atas kelestarian ekologis. Negara yang seharusnya melindungi lingkungan justru tunduk pada logika ekonomi. Regulasi perlindungan pulau kecil dilemahkan demi kepentingan tambang. Pemerintah digambarkan sebagai agen kapital yang melegitimasi izin tambang wilayah terlarang. Korupsi, kolusi, dan bujukan ekonomi membuat warga kehilangan kesadaran ekologis. Tokoh elit lokal seperti Kapitaluan ikut memanipulasi masyarakat untuk menjual tanahnya. Praktik manipulasi hukum, suap, dan pemalsuan dokumen menjadi bentuk kekerasan lambat (*slow violence*) yang merusak secara perlahan. Uang dan kekuasaan menjadi perisai bagi pelaku eksploitasi, sementara masyarakat kecil tidak punya daya untuk melawan. Akhirnya, sistem ini bukan hanya menghancurkan alam, tetapi juga tatanan sosial dan moral masyarakat Sangihe.

### **Resistensi Ekosentrisme**

Analisis pada sub temuan ini menggunakan lensa ekokritik secara dominan. Hal ini dimaksudkan bahwa novel menyajikan narasi berupa perlawanan dominasi ideologi antroposentris dari lensa ekosentris. Perlawanan ini disajikan melalui narasi kearifan budaya dan kekuatan alam Sangihe. Perlawanan ini menjadi kritik moral dan fisik terhadap kapitalisme ekstraktif.

Sebelum membahas perlawanan masyarakat Sangihe, peneliti menemukan pandangan ekosentris masyarakat Sangihe tergambar jelas dalam narasi novel. Hubungan mereka memaknai tanah dan laut di simbolkan sebagai ruang hidup yang menyatu dengan identitas sosial dan spiritual. “Sangihe adalah ruang hidup, identitas. Orang makan dari tumbuhan yang mereka tanam sendiri, mendapat lauk dari melaut atau mencari ikan dan kerang di pantai, membangun rumah dari kayu yang mereka tanam dan tebang di kebun sendiri, menyekolahkan anak dari hasil panen tahunan seperti cengkih. Seluruh hidup mereka ada berkat tanah Sangihe.” (hlm. 89).

Kutipan ini memperlihatkan cara pandang masyarakat Sangihe yang menempatkan alam bukan sekadar sumber ekonomi semata. Mereka memanfaatkan sumber kekayaan alam di sekitarnya sebagai sumber penghidupan dan makna hidup. Mereka merawat dan memelihara alam di sekitarnya agar selalu lestari dan mencukupi kebutuhan hidup. Hubungan timbal balik antara masyarakat Sangihe dan alam sekitarnya ini menjadi dasar moral yang melahirkan

kesadaran ekosentris. Alam tidak semata-mata hanya dijadikan sebagai objek untuk dieksploitasi. Namun, masyarakat Sangihe memaknai alam sebagai mitra hidup yang menopang keberlangsungan hidup mereka.

Selanjutnya, perlawanan masyarakat Sangihe diawali dari perspektif sejarah dan budaya. Novel mengungkapkan bahwa nenek moyang masyarakat Sangihe secara sadar memilih ideologi yang berkelanjutan dibandingkan mementingkan material emas. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap relasi spiritual antara manusia dan alam. Lebih lanjut, tokoh Shalom menjelaskan pengetahuan yang dibawa oleh leluhurnya tentang tanah Sangihe. Menurut Shalom, leluhurnya mengetahui alam di tanah Sangihe sangat melimpah. Dari sini lah, mereka menganggap Sangihe sebagai ruang hidup yang menyimpan nilai keseimbangan dan kesakralan ekologis. “Bukan kita pe moyang nyanda tahu, bukan dorang bodoh. Dorang tahu di dalam ibu bumi, di tempat torang tanam kelapa, pala, dan cengkih ini, ada serbuk logam kuning yang menjadi lambang kemenangan, kekayaan, juga keserakahan dan kejahatan,” kata Shalom. (hlm. 36).

Kutipan ini mengilustrasikan narasi kontra ideologi yang kuat. Istilah “ibu bumi” menunjukkan pandangan kosmologis yang menempatkan alam Sangihe sebagai entitas hidup yang pantas dihormati dan bukan untuk dieksploitasi. Leluhur di sini, memilih berkehidupan dari sistem ekonomi yang berkelanjutan (bertani) dibandingkan sistem ekonomi ekstraktif (menambang). Pandangan ini menyiratkan adanya manifestasi kearifan lingkungan lokal yang ditampilkan pengarang dalam novel sebagai salah satu topik penting dalam khazanah tematik karya sastra (Syarif, 2022). Tokoh Shalom secara moral meredefinisi emas, alih-alih sebagai sumber kekayaan, emas di simbolkan sebagai “keserakahan dan kejahatan”. Dalam kutipan ini, pengarang secara terang menampilkan benturan ideologi yang berasal dari kesadaran etis ekosentris masyarakat Sangihe dengan sistem kapitalisme ekstraktif yang merusak harmoni ekologis.

Penolakan ideologis ini tidak lain didasari atas konsekuensi yang akan terjadi di masa depan. Jika masyarakat Sangihe gagal menyelamatkan tanah kelahirannya, dipastikan alam Sangihe akan rusak parah akibat praktik ekstraktif. Hal ini kemudian memunculkan persepsi bahwa ketika alam tidak lagi dihormati dengan bijak, maka kehancuran ekologis pun menjadi keniscayaan. “Aku menghela napas panjang membayangkan bahwa dalam waktu dekat, jika perlawanan masyarakat Sangihe yang diwakili ke-45 perempuan ini gagal, maka Sangihe akan menjadi pulau kecil yang penuh lubang seperti ini dan nantinya akan menjadi danau-danau hijau pembawa petaka.” (hlm. 77).

Kutipan ini menggambarkan ancaman ekologis akibat pertambangan. Alam yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi sumber bencana. Imaji “danau-danau hijau pembawa petaka” mengandung ironi ekologis sebagai keindahan palsu yang menutupi luka lingkungan sekaligus menjadi simbol yang menakutkan. Kritik ini menegaskan bahwa praktik ekstraktif bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan bentuk “kekerasan ekologis” terhadap bumi (Nixon, 2011). Studi ekokritik dalam kajian perlawanan perempuan terhadap ekstraktivisme Seitter (2025) menekankan bahwa fiksi sangat efektif dalam memproyeksikan ketidakadilan lingkungan yang ditanggung oleh komunitas marjinal sebagai akibat dari praktik ekstraksi. Narasi ini sekaligus mengkritik keuntungan modal yang bersifat instan. Sebaliknya, kerusakan yang ditimbulkan bersifat tertunda dan permanen. Ancaman ekologis direpresentasikan pengarang melalui proyeksi naratif terhadap konsekuensi tindakan antroposentris yang berujung pada kehancuran ekosistem yang tidak terhindarkan.

Resistensi masyarakat tidak hanya lahir dari kesadaran sosial saja. Masyarakat juga masih meyakini hubungan spiritual dan budaya setempat melalui tanda-tanda alam. Ketika manusia gagal melawan melalui jalur hukum, alam itu sendiri lah yang akan melawan. “Sekeras apa pun perusahaan lewat kroni-kroninya berusaha menciptakan narasi bahwa peristiwa hantu tersebut adalah upaya oknum yang berusaha mengganggu dan menghalangi perusahaan beroperasi, faktanya masyarakat lebih percaya bahwa tanah yang akan ditambang telah dikutuk leluhur. Bumi marah dan menolak mereka.” (hlm. 243).

Kutipan ini menunjukkan dimensi metafisik dan perlawanan masyarakat lokal. Keyakinan terhadap “kutukan leluhur” menegaskan hubungan spiritual antara manusia dan alam. Masyarakat Sangihe meyakini adanya hubungan timbal balik. Jika manusia berbuat baik, maka alam akan membalas dengan kebaikan dan jika manusia berbuat jahat kepada alam maka alam itu pun akan membalas dengan hal yang sama. Maka frasa “bumi marah” ini dimaknai sebagai ekspresi alam yang menolak dieksploitasi. Alam tidak lagi menjadi objek pasif. Alam adalah subjek yang mampu bereaksi terhadap ketidakadilan yang menyimpannya. Unsur mitologi dan spiritualitas masyarakat setempat dihadirkan pengarang dengan menempatkan alam sebagai tokoh etis (Endraswara, 2016). Hal ini merupakan bentuk kontra terhadap ideologi antroposentris yang menempatkan manusia pada puncak hirarki kehidupan.

Puncak narasi perlawanan ekosentris diwujudkan melalui peristiwa fisik. Hal ini menjadi penutup kritik terhadap kekuasaan modal. Alam berperan sebagai kekuatan yang merespon ketimpangan dengan menghadirkan hukuman atas konsekuensi yang dilakukan oleh perusahaan tambang. “Perusahaan biongo penjahat lingkungan sendiri akhirnya lari tunggang

langgang setelah sebuah gempa besar mengubur beberapa alat berat dan pekerja mereka.” (hlm. 277).

Melalui lensa ekokritik Buell (1995), fenomena “gempa besar” dianalisis sebagai pemberontakan ekologis. Pengarang secara sadar menempatkan alam sebagai entitas dinamis dan aktor etis tertinggi. Alam seolah menegakkan penghakiman moralnya sendiri terhadap sistem yang rakus dan menindas. Bencana “gempa besar” bukan hanya peristiwa fisik, tetapi simbol keadilan ekologis. Selain itu, gempa di sini dimaknai sebagai penghakiman moral terakhir yang mengembalikan keseimbangan setelah lama dilanggar. Pengarang memanfaatkan peristiwa ini sebagai kritik ideologis bahwa kekuasaan kapitalisme ekstraktif yang di dorong oleh ideologi antroposentris pada akhirnya gagal menaklukkan dihadapan kekuatan etis dan fisik alam.

Sub temuan ini memperlihatkan bentuk perlawanan masyarakat Sangihe terhadap ideologi antroposentris-kapitalisme ekstraktif melalui perspektif ekokritik. Novel menampilkan resistensi dari lensa ekosentris bahwa alam dan budaya lokal menjadi pusat kekuatan moral dan spiritual. Masyarakat Sangihe digambarkan memiliki pandangan hidup yang menempatkan tanah dan laut sebagai bagian dari identitas ekologis sekaligus sumber kehidupan sakral. Leluhur mereka menolak godaan material emas dan memilih hidup dengan sistem berkelanjutan sebagai wujud kesetiaan terhadap “ibu bumi”. Pandangan ini menegaskan relasi spiritual antara manusia dan alam yang saling menopang. Alam di proyeksikan sebagai korban sekaligus kekuatan moral yang memberi peringatan terhadap keserakahan manusia. Kerusakan lingkungan ditampilkan lewat imaji “danau-danau hijau pembawa petaka” yang menjadi simbol luka ekologis. Sekaligus cermin kritik terhadap logika ekstraktif yang menipu dengan keindahan semu. Masyarakat Sangihe percaya ketika hukum gagal melindungi alam, alam itu sendiri lah yang akan melawan. Sebagaimana keyakinan masyarakat Sangihe pada “kutukan leluhur” menunjukkan bahwa bumi memiliki kesadaran etis dan daya tolak terhadap eksploitasi penambangan emas. Klimaksnya, gempa besar menenggelamkan alat berat perusahaan tambang. Peristiwa ini menjadi simbol penghukuman moral dari alam. Melalui narasi ini, pengarang menegaskan bahwa kekuatan kapitalistik tidak mampu menaklukkan etika dan kuasa alam yang lebih tinggi. Kontra ekosentris masyarakat Sangihe ditampilkan sebagai tindakan sosial yang tercermin melalui ekspresi kesadaran ekologis dalam menempatkan alam sebagai subjek etis tertinggi sekaligus penentu keseimbangan moral.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pembacaan menunjukkan bahwa novel Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut karya Dian Purnomo merepresentasikan kritik ideologis dan ekologis terhadap kapitalisme ekstraktif yang berakar pada pandangan antroposentris. Ideologi ini menempatkan manusia dan modal sebagai pusat, sementara alam direduksi menjadi objek eksploitasi ekonomi. Dampaknya meluas pada kerusakan ekologi, ketimpangan sosial, dan disfungsi moral serta hukum terhadap masyarakat Sangihe. Analisis ini menyingkap tiga fokus utama. Pertama, novel mengungkap manifestasi ideologi antroposentris-kapitalisme ekstraktif yang mereduksi Pulau Sangihe menjadi komoditas ekonomi, dan memperlihatkan internalisasi ideologi tersebut melalui *transfer* pengetahuan destruktif dari praktik tambang di luar pula. Kedua, novel membongkar mekanisme kekuasaan antroposentris yang menaklukan tatanan hukum dan politik melalui kolusi negara, korporasi, dan elit lokal yang melegitimasi perampasan tanah dengan retorika kesejahteraan serta praktik korupsi yang menciptakan kekerasan ekologis. Ketiga, novel menampilkan resistensi ekosentris masyarakat Sangihe yang berpijak pada kearifan leluhur dan spiritualitas ekologis. Alam digambarkan sebagai entitas hidup, pusat moral, dan kekuatan penegak keadilan ekologis. Puncak perlawanan ditandai oleh simbol intervensi alam (*gempa bumi*) yang menegaskan kegagalan ideologi kapitalisme ekstraktif dihadapan etika ekologis. Dengan demikian, novel ini menegaskan pentingnya kesadaran ekologis baru yang menempatkan relasi manusia dan alam secara setara, berkelanjutan, dan berkeadilan. Penelitian ini mengakui adanya keterbatasan data sastra. Analisis berfokus pada konflik di level lokal dan nasional seperti kolusi elit dan pelanggaran regulasi. Novel tidak memberikan kutipan yang cukup untuk menganalisis dimensi yang lebih luas dari kapitalisme ekstraktif. Misalnya, pola jaringan finansial global oleh bank yang mendanai atau rantai komoditas internasional emas Sangihe. Meskipun demikian, artikel ini memberikan kritik mendalam terhadap ideologi antroposentris-kapitalisme ekstraktif yang bersifat destruktif. Ideologi ini dipertentangkan dengan etika ekosentris yang berupaya mempertahankan harmoni alam. Namun, perlu disadari bahwa aspek makro pada ekonomi global memerlukan analisis berbasis data empiris di luar cakupan teks fiksi. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan dengan mempertimbangkan eksplorasi objek kajian lain atau pengembangan teori terhadap objek kajian novel ini.

**DAFTAR REFERENSI**

- Allsadek, M., & Benhin, J. (2023). Natural Resource Curse: A Literature Survey and Comparative Assessment of Regional Groupings of Oil-Rich Countries. *Geoforum*, 84, 103741. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103741>
- Bebbington, A., Humphreys Bebbington, D., Bury, J., Langan, J., Muñoz, J. P., & Scurrah, M. (2008). Contention and ambiguity: Mining and the possibilities of development. *Development and Change*, 39(6), 887–914. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2008.00517.x>
- Berenschot, W., & Dhialuhaq, A. (2023). The Production of Rightlessness: Palm Oil Companies and Land Dispossession in Indonesia. *Globalizations*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/14747731.2023.2253657>
- Bisht, A. (2019). Discontent, Conflict, Social Resistance and Violence at Non-metallic Mining Frontiers in India. *Economy and Society--the INSEE Journal*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.37773/ees.v2i1.54>
- Buell, L. (1995). *The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture*. Harvard University Press.
- Dulhunty, A. (2023). When Extractive and Racial Capitalism Combine-Indigenous and Caste based Struggles with Land, Labour and Law in India. *Geoforum*, 147, 103887. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103887>
- Endraswara, S. (2016). *Metodologi Penelitian Ekologi Sastra: Konsep, Langkah, dan Penerapan*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Gill, B. S. (2021). A World in Reverse: The political ecology of racial capitalism. *Politics*, 43(2), 153–168. <https://doi.org/10.1177/0263395721994439>
- Glotfelty, C., & Fromm, H. (1996). *The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology*. University of Georgia Press.
- Gudynas, E. (2015). *Extractivismos: Ecología, Economía y Política de un Modo de Entender el Desarrollo y la Naturaleza*. Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).
- Gudynas, E. (2018). Extractivisms: Concepts and their Implications for Development. *Journal of Latin American Geography*, 10(1), 185–206.
- Harahap, R., & Br Karo Sekali, G. M. (2025). Peran Sastra dalam Memperkaya Budaya dan Identitas Bangsa. *Jurnal Inovasi Dan Pembangunan Masyarakat*, 6(2), 66–76. <https://doi.org/10.63924/jsid.v6i2.83>
- Harsono, S. (2008). Ekokritik: Kritik Sastra Berwawasan Lingkungan. *Kajian Sastra*, 32(1), 31–50.
- Hartoto, A. S. (2025). Technologies of Dispossession: Comparative Analysis of Frontier-Making and State Power in Indonesia. *The Journal of Peasant Studies*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/03066150.2025.2549344>
- Harvey, D. (2003). *The New Imperialism*. Oxford University Press.
- Heise, U. K. (2017). Introduction from: The Routledge Companion to the Environmental Humanities. In *The Routledge Companion to the Environmental Humanities* (pp. 1–10). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315766355.ch101>

- Henry, E. F. (2019). Conjuring the Past: Slow Violence and the Temporalities of Environmental Rights Tribunals. *Geoforum*, 108, 259–266. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.09.001>
- Irfan, A., Perangin-Angin, H. P., & Purba, G. Y. S. (2024). Community Perception of Gold Mining Affecting the Water Quality of the Wariori River. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4(5), 852–856. <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2843>
- Juanda, J. (2025). Ekofeminisme dan Perjuangan Perempuan Melawan Eksploitasi Lingkungan di Pulau Sangihe. *AKSARA: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 26(1), 283–300. <https://doi.org/10.23960/aksara/v26i1.pp283-300>
- Karmakar, G., & Chetty, R. (2023). Extraction and environmental injustices: (De)colonial practices in Imbolo Mbue’s *How Beautiful We Were*. *ETropic: Electronic Journal of Studies in the Tropics*, 22(2). <https://doi.org/10.25120/etropic.22.2.2023.3970>
- Nikmah, F., Nuryatin, A., & Mulyono, M. (2024). Women’s Struggle Against the Exploitation of Nature Dian Purnomo’s Novel a Study of Ecofeminism. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 13(3), 304–313.
- Nixon, R. (2011). *Slow Violence and the Environmentalism of the Poor*. Harvard University Press.
- Nugraha, A., & Purwanto, S. A. (2020). Neo-ekstraktivisme tambang timah di Pulau Bangka. *Indonesian Journal of Religion and Society*. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i1.95>
- Papendang, Y. M., Maramis, R. A., & Pinasang, D. R. (2023). Pemberian Izin Pertambangan pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Era Otonomisasi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 4672–4680.
- Pradhan, S., & Kumar, N. (2023). Destabilizing “development”: A critique of capitalocene in Sarah Joseph’s *Gift in Green*. *Journal of Narrative and Language Studies*, 11(21), 85–99. <https://doi.org/10.59045/nalans.2023.17>
- Purnomo, D. (2023). *Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmadi, M. T., Lubis, D. P., Damanik, M. R. S., Maulia, T., Yenni, N., Nurwihastuti, D. W., Permana, S., & Sugiharto. (2024). The Natural Resource Curse: A Geographical Perspective. *Proceedings of the 4th International Conference on Humanities Education, Law, and Social Science (ICHELS)*, 279–287. <https://doi.org/10.5220/0013417200004654>
- Ratna, N. K. (2011). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Pustaka Pelajar.
- Rini, W. P. (2018). Paradoks Narasi Penyelamatan Keseimbangan Ekosistem dalam Novel Kailasa Karya Jusuf AN Kajian Ekokritik. *Poetika: Jurnal Ilmu Sastra*, 6(2), 122–132. <https://doi.org/10.22146/poetika.v6i2.40298>
- Safitri, N. M., Udin, S., & Sholehuddin, M. (2024). Kajian Feminisme Novel Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut Karya Dian Purnomo Hubungannya dengan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. *Prosiding Seminar Nasional Daring: Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(1), 513–525.
- Salsabila, S. A. (2024). *Hegemoni dalam Novel “Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut” Karya Dian Purnomo (Kajian Hegemoni Gramsci)* [Universitas Darul Ulum Lamongan]. <http://repository.unisda.ac.id/id/eprint/3321>

- Savitri, J. A. (2022). Resource extraction developmentalism and the coal industry across the Indonesian archipelago: to the benefits of whom? *WIMAYA: Interdisciplinary Journal of International Affairs*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.33005/wimaya.v3i01.67>
- Seitter, C. (2025). Cuerpos de Mujeres en Resistencia al Extractivismo y a La Destrucción Medioambiental: Perspectivas Feministas Ecocríticas Sobre Artistas\* Latino Americanas.\*. *Ecozon@*, 16(1), 239–245. <https://doi.org/10.37536/ECOZONA.2025.16.1.5474>
- Supian, S., Manugeran, M., & Purwarno, P. (2022). Tin Exploitation: An Ecocriticism Approach in Andrea Hirata's Rainbow Troops. *Journal of Language*, 4(2), 229–243.
- Syarif, N. A. (2022). Kearifan Lingkungan Desa dalam Novel Indonesia Mutakhir: Kajian Ekokritik Sastra. *Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 13(1). <https://doi.org/10.31503/madah.v13i1.412>
- Wahyudin, S. A. N., Qibtiah, M., & Sutejo, S. (2024). Social Resistance of the Sangihe People In the Novel of Perempuan yang Menunggu di Lorong Menuju Laut by Dian Purnomo. *Jurnal Skripta*, 10(2), 105–115.
- Yuwono, S. B., Banuwa, I. S., Suryono, N., Somura, H., & Dermiyati, D. (2023). Mercury pollution in the Soil and River Water of the Ratai Watershed by Artisanal and Small-Scale Gold Mining Activities in Pesawaran District, Lampung, Indonesia. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 10(2), 4233–4243. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2023.102.4233>